

BAB I

PENDAHULUAN

Pandemi COVID – 19 merupakan suatu peristiwa yang telah menarik perhatian dunia karena keberadaannya telah mengancam kesehatan masyarakat secara global.¹ Pagebluk COVID – 19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019 yang kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia hingga menyebabkan negara – negara di berbagai belahan dunia mengalami kondisi darurat COVID – 19 dan menjadikan kasus pagebluk ini menjadi pandemi COVID – 19.²

Coronavirus sendiri merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan sebagai portal untuk menyerang yang kemudian berkembang biak di sel epitel selaput lendir saluran pernapasan sehingga menyebabkan infeksi lokal pada saluran pernapasan atau perubahan patologis jaringan dan organ di luar pernapasan. Virus ini berupa *RNA strain* tunggal positif yang memiliki karakteristik berbentuk bulat atau elips, berkapsul, tidak bersegmen, dan memiliki diameter sekitar 50-200m. Coronavirus ini dapat diklasifikasikan dalam genus *betacoronavirus*. Spesies ini mirip dengan *SARS-CoV* dan *MERS-CoV* tetapi tidak persis sama.³

Di Indonesia kasus terkonfirmasi positif pada tahun 2022 telah mencapai 6.052.100 kasus, 5.891.872 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 156.531 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Pada tingkat provinsi, jumlah kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 1.106.085 kasus, 1.089.788 telah terkonfirmasi sembuh dan 15.800 lainnya dinyatakan meninggal dunia.⁴ Di tingkat kabupaten,

jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Garut telah mencapai 86.486 kasus, 2425 diantaranya disumbang dari daerah Tarogong Kaler.⁵

Pada fase transisi akhir pandemi, COVID – 19 tak lagi dianggap sebagai ancaman bagi orang – orang.⁶ Hal ini terlihat dari berbagai adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan pemerintah dan diterapkan oleh masyarakat. Peraturan yang ditetapkan mulai dilonggarkan seiring berjalannya waktu.⁷ Meski Indonesia sudah masuk ke awal fase transisi, bukan berarti bebas dari ancaman COVID-19. Perilaku masyarakat yang buruk dan pelaksanaan vaksinasi yang buruk dapat mengarahkan kembali pada situasi yang buruk. Ini terbukti dari mulai meningkat kembalinya kasus terkonfirmasi positif yang didominasi oleh subvarian *Omicron* BA.4 dan BA.5 hingga mencapai 6000 kasus perhari.⁸ Diketahui subvarian *Omicron* ini mengakibatkan gejala yang cukup parah pada individu yang tidak memenuhi dosis vaksinasinya.⁹

Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dapat dipilih dalam penanggulangan dan pencegahan untuk mengurangi penularan/transmisi dari COVID – 19. Dengan dicapainya kondisi kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), angka kesakitan dan kematian akibat COVID – 19 yang juga menurun seiring berjalannya waktu.¹⁰ Vaksinasi dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang dapat mengendalikan penyebaran COVID – 19 karena vaksin merupakan suatu upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah penyakit menular berbahaya.¹⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian Normelia (2022)¹¹ yang menyatakan terdapat perbedaan antara jumlah penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 pada kelompok yang belum diberikan vaksin dengan

kelompok sesudah diberikan vaksin, yang menunjukkan bahwa vaksin cukup efektif untuk mengurangi jumlah terkonfirmasi Covid-19 (9.317×10^{-49}).

Vaksin merupakan fragmen kecil produk biologi yang dilemahkan dan tidak berbahaya dan mengandung antigen yang akan secara aktif mengembangkan antibodi khusus untuk melawan penyakit tertentu, sehingga ketika tubuh bertemu dengan antigen organisme yang sebenarnya dikemudian hari, tubuh akan mengingat patogen tersebut sehingga patogen tersebut akan diserang dan tidak dapat melakukan penetrasi ke dalam tubuh.¹²

Untuk memenuhi target vaksinasi nasional untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), pemerintah melakukan berbagai upaya dengan berbagai pihak, terutama TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, BIN, BUMN, organisasi keagamaan dan sosial, serta pihak swasta. Salah satunya ialah program wajib vaksin. Program ini telah diterapkan pada hampir semua sektor baik itu transportasi, pelayanan publik maupun area publik. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan dalam proses vaksinasi sebagai upaya untuk mencapai kondisi mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat sehingga dapat produktif secara sosial dan ekonomi dalam keseharian.¹⁰

Berdasarkan data vaksinasi Kemenkes pada trimester pertama tahun 2022 total jumlah capaian vaksinasi penduduk Indonesia pada vaksin pertama telah mencapai angka 199,342,821 dosis atau setara dengan (95.72%), sedangkan penerima vaksin dosis kedua telah mencapai 165,660,331 dosis atau setara dengan (79.54%) dan dosis ketiga telah mencapai 41,037,062 dosis atau setara dengan

(19.70%).¹³ Di Jawa Barat, total vaksin pertama telah mencapai angka 36,024,200 dosis atau (95.03%) dari target provinsi¹⁴ dan total peserta vaksin kedua telah mencapai angka 30,961,908 dosis atau (81.68%) dari target provinsi¹⁵ serta total vaksin ketiga telah mencapai angka 41,034,062 dosis atau (19.70) dari target provinsi.¹⁶

Di tingkat kota dan kabupaten, Kabupaten Garut menunjukkan nilai yang baik antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Pada vaksinasi dosis pertama kabupaten Garut telah mencapai dosis 1,848,016 dosis atau (93,44%) dari target provinsi¹⁴ dan pada dosis kedua telah mencapai 1,654,784 dosis atau (83.67%) dari target provinsi.¹⁵ Namun kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau *booster* diketahui masih rendah hanya mencapai 573,945 atau (29.02%) dari target provinsi.¹⁶ Vaksin *booster* dianggap merepotkan dan bukan termasuk kebutuhan yang prioritas. Selain itu masyarakat enggan merasakan efek samping yang akan dirasakan setelah melakukan vaksinasi.¹⁷

Diketahui vaksin *booster* dibutuhkan untuk mengembalikan imunitas dan proteksi klinis pada saat vaksin awal mungkin mulai hilang dikarenakan adanya kecenderungan penurunan jumlah antibodi sejak 6 bulan pasca vaksinasi terutama di tengah kemunculan varian baru dari COVID – 19. Mengacu pada studi meta-analisis dan analisis regresi oleh Fekin et al pada tahun 2021, diketahui bahwa efektivitas 4 vaksin yang telah menerima EUL dari WHO mengalami penurunan aktivitas sebesar 8% dalam 6 bulan terakhir pada semua kelompok umur. Pada periode yang sama untuk orang berusia 50 tahun ke atas, masing-masing terjadi

penurunan 10% dalam efektivitas vaksin dan 32% dalam mencegah munculnya gejala.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa capaian vaksinasi di Kabupaten Garut yang masih belum terpenuhi menunjukkan adanya indikasi bahwa masyarakat di Kabupaten Garut masih belum sepenuhnya melakukan penerimaan terhadap vaksin COVID – 19. Sedangkan pemenuhan dosis vaksin dibutuhkan untuk mengoptimalkan efektivitas vaksin dalam melakukan perlindungan.

Hal ini terkait dengan pengetahuan, persepsi dan perilaku masyarakat. Menurut penelitian Nina (2021)¹⁹, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang upaya pencegahan COVID-19 yang cukup (72%) memiliki perilaku yang baik mengenai pencegahan COVID – 19. Sejalan dengan penelitian Husnah (2021) yang menyatakan penduduk perkotaan di Banda Aceh dengan penyakit yang mendasari memiliki perilaku pencegahan yang buruk, sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi tingkat dan skor persepsi lebih cenderung terlibat dalam perilaku pencegahan yang baik.²⁰

Pengetahuan, persepsi dan penerimaan merupakan tiga aspek yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap suatu penyakit maupun pengobatan. Pengetahuan dan juga persepsi merupakan aspek yang akan mempengaruhi dalam membentuk perilaku seseorang.²¹ Dalam penelitian Ginting (2021)²², pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang yang baik, akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya. Semakin baik pengetahuan, persepsi yang dimiliki oleh seseorang maka semakin baik pula perilaku pencegahan penyebaran penyakit yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian Mujiburrahman

(2020)²¹, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat, semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan. Begitu juga penelitian Merry (2021)²³ yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan persepsi yang baik memiliki perilaku yang baik pula.

Diketahui, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes RI yang diadakan tahun 2021²⁴, diketahui bahwa (67%) masyarakat Indonesia menerima vaksin dan meyakini bahwa COVID – 19 dapat dicegah melalui vaksin. Sedangkan sebanyak (33%) lainnya masih belum yakin bahkan menolak vaksin sebagai upaya pencegahan COVID – 19. Sama halnya dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat kota Palembang terhadap vaksin Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Alang Alang Lebar masih tergolong rendah yaitu (56,90%).²⁵ Sejalan dengan penelitian Ahmed (2021) yang menunjukkan bahwa sebanyak (59.4%) pekerja kesehatan di negara yang berpendapatan rendah menganggap bahwa sekitar 201 (49,7%) peserta menyatakan tidak mungkin menurunkan prevalensi COVID-19 tanpa dosis vaksin kedua.²⁶ Ini menunjukkan bahwa vaksin COVID – 19 ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana hubungan pengetahuan, persepsi dan penerimaan dengan perilaku terhadap vaksinasi COVID – 19 masyarakat Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Pengetahuan, Persepsi Dan Penerimaan Dengan Perilaku Terhadap

Vaksinasi Covid – 19 Masyarakat Desa Langensari September 2022.” Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, persepsi, dan penerimaan dengan perilaku terhadap vaksinasi COVID – 19 masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membuat suatu intervensi kritis pada masyarakat untuk meningkatkan angka penerimaan vaksinasi COVID – 19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID –19.

